



Mantan Sekda Kalbar Calon Tersangka

Estimasi Ada 13 Orang Calon Tersangka Lain

PONTIANAK—Polda Kalbar tidak hanya menetapkan dua tersangka, Usman Jafar (UJ) dan Zulfadli (Zul) dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos), APBD Kalbar tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008. Melainkan ada 13 orang calon tersangka dalam perkara yang berdasarkan audit BPK merugikan keuangan negara Rp20 miliar.

Namun demikian, pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat belum dapat menyebutkan siapa saja orang yang bertanggungjawab dan yang menikmati dana bansos tersebut.

"Kami masih akan melakukan gelar perkara lagi, untuk menentukan siapa saja tersangka lain. Estimasi ada 13 orang, termasuk mantan Sekda Kalbar," kata Direktur Reserse

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



BANSOS: Kapolda Kalbar memberi keterangan kepada awak media seputar kasus Bansos yang melibatkan dua mantan pejabat Kalbar.

SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST



Mantan Sekda Kalbar Calon Tersangka

Sambungan dari halaman 1

Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo saat memberikan keterangan pers, kemarin.

Menurut Widodo, gelar perkara rencananya akan dilakukan besok (hari ini), untuk menentukan calon tersangka. Setelah dilakukan gelar perkara, kata Widodo, maka Polda Kalbar baru dapat menentukan tersangka.

"Sebelum gelar, kami belum bisa melihat alur. Apa peranan dari mereka, tapi secara kasat mata, mantan Sekda masuk. Karena jelas perannya," kata Widodo.

Disinggung soal pengembalian uang negara, Widodo mengaku pernah mendengar ada rencana pengembalian uang dari salah satu tersangka. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut, Widodo menerangkan hingga saat ini belum ada pengembalian uang negara yang digunakan tersangka.

Menurut Widodo, jika tidak ada iktikad baik dari tersangka untuk mengembalikan uang negara, maka pihaknya akan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dilanjutkan Widodo, pengusutan kasus Bansos ini berawal dari adanya indikasi kerugian negara dari Bansos sebelumnya, yakni Bansos KONI. Dimana dalam perkara tersebut, Polda Kalbar telah menetapkan satu orang ter-

sangka, Iswanto, mantan Bendahara KONI Kalbar. "Perkaranya sudah diputus," katanya.

Dari perkara tersebut, menurut Widodo, ada keanehan. Dimana pada saat itu, Ketua KONI Kalbar yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Barat tidak terjerat. "Ini kan aneh. Pak UJ yang waktu itu menjabat sebagai Ketua KONI sekaligus Gubernur Kalbar mengucurkan dana ke KONI, Rp18 miliar, tapi penggunaannya fiktif. Tapi kemarin kok cuma satu yang masuk. Pak Kapolda (Arief Sulistyanto) tidak mau kalau cuma satu, otomatis kedua orang ini apa perannya. Saya pun tak habis fikir. Seharusnya kan masuk juga. Dalam arti, peran kedua orang ini (UJ dan Zul)," katanya.

Terkait perkara Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, lanjut Widodo, berdasarkan hasil audit BPK, telah keluar angka Rp5 miliar. Dana tersebut menggunakan dana Sekda Kalbar yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Secara terpisah, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, keluarnya hasil audit investigasi BPK RI, tak lepas dari dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana Polda Kalbar meminta bantuan KPK terhadap BPK untuk mempercepat hasil audit investigasinya.

"Ini tak lepas dari bantuan KPK, yang waktu itu bapak Adnan Pandu Praja datang ke

Polda Kalbar. Saya minta bantuan kepada beliau, agar mempercepat dikeluarkannya audit investigasi BPK," kata Arief.

Dengan keluarnya hasil audit investigasi atau penghitungan kerugian negara, maka penyidik Polda Kalbar melakukan gelar perkara dan menetapkan UJ dan Zul sebagai tersangka.

Dilanjutkan Arief, pemanggilan kedua tersangka sedang proses oleh para penyidik.

Arief mengaku tidak mau berandai-andai. Menurutnya, semua sama dimata hukum, sehingga harus patuh hukum. Apapun yang terjadi, proses hukum akan dijalankan dengan baik.

Arief telah memerintahkan untuk melakukan gelar perkara besok (hari ini) secara detail, mulai dari awal sampai saat ini.

"Karena apa yang dilakukan penyidik, saya tidak mau parsial. Harus secara global sehingga nanti akan bisa diketahui kaitannya dengan pihak-pihak mana saja. Termasuk perkara yang sudah divonis di pengadilan. Ini kan baru satu orang saja (Bendahara KONI). Tentunya akan ada pihak lain yang tahu dan ikut bertanggungjawab. Jangan ada kesan, bendahara ini menjadi korban. Ini adalah suatu proses, ada yang bertanggung jawab, ada yang menggunakan dan menikmati hasil penyimpangan itu. Kami harus urai dan kami temukan supaya jelas duduk permasalahannya," pungkasnya. (arf)